

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Israel adalah sebuah negara yang terletak di tengah-tengah negara Arab. Sebuah negara yang dikelilingi oleh negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Dalam catatan sejarah, wilayah Israel yang berada di tengah-tengah negara Arab yang menimbulkan polemik tersendiri. Tidak jarang timbul konflik antara Israel dan beberapa negara Arab. Menurut catatan sejarah, konflik Israel-Arab telah terjadi sebanyak lima kali peperangan. Pertama, terjadi pada tahun (1948-1949) yakni sebuah perang yang bermula dari keputusan PBB untuk melakukan partisi Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi, sehingga membangkitkan kemarahan dari beberapa negara Arab tersebut yang berujung dalam bentuk perang besar. Perang kedua meletus pada 29 Oktober sampai 7 November 1956 menyangkut sengketa Terusan Suez.

Perang ketiga pada tahun 1967 dapat dikatakan cukup tenang, kecuali konflik-konflik perbatasan yang tidak pernah menjadi konflik penting yang melibatkan negara-negara Arab yang berbatasan dengan Israel seperti Lebanon. Perang keempat meletus pada tahun 1973 yakni perang antara Mesir dan Suriah melawan Israel. Dan yang terakhir yaitu perang kelima terjadi pada tahun (1982) yaitu masalah palestina sebagai kesatuan terdepan yang memperjuangkan

pulihnya hak-hak rakyat Palestina yang paling asasi yang diakui baik dunia Arab maupun dunia Internasional.¹

Dalam rangkaian perang Israel-Arab selama beberapa tahun terakhir, Israel kembali melakukan perang melawan Lebanon. Perang antara Israel dengan organisasi militer di Lebanon, Hizbullah (yang berarti partai Tuhan/Allah) dimulai pada 12 Juli 2006. Perang yang terjadi selama 34 hari. Sebuah perang yang berawal ketika Hizbulloh melintasi perbatasan antara Lebanon dan Israel untuk menyerang pasukan Israel (*Israel Defense Force/IDF*) yang sedang berpatroli dengan jip Humvees di daerah perbatasan bernama Zar'it Shtula. Dalam misi itu, Hizbullah berhasil membunuh tiga anggota IDF dan menyadera dua temannya. Segera setelah misi tersebut berhasil dilaksanakan, mereka kembali ke Lebanon dan membawa dua orang tawanan. Pemimpin Hizbullah, Hassan Nassrallah, mengatakan bahwa dua orang anggota IDF tersebut di tawan sebagai alat untuk menukar anggota Hizbullah yang ditawan oleh Israel. Dua orang yang disandera oleh Hizbullah tersebut bernama Ehud Goldwasser dan Eldad Regev².

Serangan tersebut merupakan bagian dari serangkaian operasi yang bernama "*Operation True Promise*". Selain menyerang dua jip Humvees yang sedang berpatroli di daerah perbatasan dan menyandera dua anggota IDF, *Operation True Promise* juga meluncurkan sejumlah roket untuk menyerang berbagai daerah perbatasan Lebanon dan Israel.

Di pihak Israel, setelah mendapat kabar bahwa dua jip Humvees yang sedang berpatroli di Zar'it diserang dan dua anggota IDF disadera, segera sebuah

¹ Riza Sihbudi. 1995. *Profil Negara-Negara Timur Tengah*. Jakarta : PT.Dunia Pustaka Jaya.

² Lee P. *The History Channel: The Israel Hizbullah War 2006* (diakses pada 10 Maret 2010). diunduh

tank Israel bernama Merkava Mark II yang berada di dekat tempat kejadian berusaha untuk mengejar pasukan Hizbullah yang menyandera dua anggota IDF tersebut. Tetapi, tank tersebut kemudian hancur terkena granat Improvised Explosive Device (IED). Empat pasukan Israel yang berada di dalam tank tersebut terbunuh³.

Perdana Menteri Israel pada saat itu, Ehud Olmert, langsung bereaksi keras. Dia mengatakan bahwa serangan itu adalah "*an act of war*", dan bahwa "*Lebanon will bear the consequences of its actions*", serta menjanjikan "*a very painful and far-reaching response*"⁴. Pada saat itulah pasukan militer Israel langsung menyerang Lebanon sebelum rapat kabinet untuk menyikapi Lebanon dilakukan. Pasukan militer Israel menyeberang perbatasan Lebanon untuk menggelar serangan dari udara, laut dan darat. Sedangkan di sisi lain, Hizbullah merespon serangan itu dengan terus-menerus melepaskan ratusan roket yang diarahkan di bagian utara Israel. Kebanyakan roket tersebut mengenai kota Israel yang bernama Haifa. Permulaan serangan Israel terhadap Lebanon dan Hizbullah ini "berhasil" menewaskan penduduk sipil sebanyak 44 orang. Sedangkan roket pasukan Hizbullah berhasil merusak satu dermaga dan menenggelamkan satu kapal militer Israel⁵.

Setelah diadakan rapat kabinet yang panjang, pada tanggal 16 Juli 2006, kabinet Israel menyatakan bahwa serangan-serangan terhadap Lebanon tersebut bukanlah serangan terhadap negara Lebanon. Serangan tersebut hanya khusus

³ *Ibid*

⁴ Fletcher, Martin. *Regional tensions fuel Lebanon-Israel clashes* (diakses pada 13 Juli 2008); diunduh dari Video dari MSNBC

⁵ Eshel, David. *Lebanon 2006: Did Merkava Challenge Its Match?* *Armor* 116:12-14 January-

ditujukan kepada Hizbullah, kelompok militer di Lebanon yang dianggap bertanggung jawab terhadap insiden Zar'it Shtula.

"Israel is not fighting Lebanon but the terrorist element there, led by Nasrallah and his cohorts, who have made Lebanon a hostage and created Syrian and Iranian sponsored terrorist enclaves of murder"⁶.

(Israel tidak berperang melawan Lebanon, tetapi kelompok teroris di negara tersebut, yang dipimpin oleh Nasrallah dan pengikutnya yang telah membuat Lebanon menjadi sandera dan menjadikan Suriah dan Iran mensponsori daerah-daerah teroris pembunuh)

Begitu kata juru bicara kabinet di Israel.

Nasrallah sendiri adalah Pemimpin tertinggi Hizbullah yang mengaku bertanggung jawab terhadap insiden Zar'it. Nasrallah beralasan bahwa Israel telah melanggar janjinya sendiri untuk melepaskan empat anggota Hizbullah yang ditawan. Karena jalan diplomasi telah gagal, demikian kata Nasrallah, maka satu-satunya jalan yang tersisa adalah dengan perang. Nasrallah menuntut untuk dilakukan pertukaran tahanan.

Israel menolak tawaran tersebut dan setelah penolakan itulah perang antara Israel dan Hizbullah resmi berawal. Perang ini terjadi selama 34 hari terhitung sejak tanggal 12 Juli dan terkenal dengan beberapa sebutan. Di Lebanon, perang ini dikenal dengan sebutan *July War* sedangkan di Israel, perang ini disebut sebagai *Second Lebanon War*. Beberapa komunitas internasional menyebutnya sebagai *2006 Israel- Hizbullah War*. Tapi, sebutan yang paling umum terhadap perang ini adalah Perang Lebanon (*Lebanon War*).

Selama perang tersebut, kedua belah pihak terus menerus bertukar serangan dengan meluncurkan roket, misil, dan artileri yang kebanyakan

menimbulkan kerusakan dan kerugian penduduk sipil yang tinggal di perbatasan Israel dan Lebanon. Dalam sejarah perang Arab-Israel, perang Lebanon pada tahun 2006 ini sedikit berbeda dengan perang-perang sebelumnya. Strategi Israel ketika berperang dengan bangsa Arab sebelum tahun 2006 selalu mengandalkan serangan dari darat. Tetapi pada perang Lebanon, Israel banyak sekali bergantung pada pasukan udara dan laut untuk mengalahkan Hizbullah. Sedangkan di sisi lain, Hizbullah mengandalkan serangan dari peluncuran roket yang merupakan bantuan dari Syria dan Iran. Selain berhasil menenggelamkan satu kapal militer Israel, roket-roket tersebut juga berhasil merusak sebuah bandara di Haifa.⁷

Dalam perang itu, pasukan udara Israel telah menerbangkan lebih dari 12.000 bom dari udara, sedangkan pasukan lautnya telah menembakkan lebih dari 2.500 misil dan pasukan daratnya telah melempar sekitar 100.000 granat. Tentu saja serangan ini telah merusak beragam infrastruktur di Lebanon. Di sisi lain Hizbullah, yang berperang langsung dengan Israel—karena pemerintah Lebanon tidak berbuat apa-apa, membalas serangan itu dengan roket Kautilya yang berjumlah sekitar 4000.

Menurut Robert Lee, terdapat dua strategi Israel dalam menghadapi Hizbullah perang Lebanon. Strategi yang pertama adalah memotong jalur bantuan dari Iran dan Syria yang merupakan sponsor utama Hizbullah dalam penyediaan anggaran, senjata, dan pelatihan perang. Sedangkan strategi yang kedua adalah menyerang berbagai infrastruktur yang sama sekali tidak berkaitan dengan Hizbullah. Dengan menyerang ruang-ruang publik di Lebanon, Israel ingin

⁷ Marrero, Abe F. *The Fourth Dimension: The Israel-Hizbullah Clash and the Shape of Wars to Come*. *Armed Forces Journal* 144:32-35 May 2007

menunjukkan kepada pemerintah dan penduduk Lebanon bahwa Hizbullah telah mengantarkan mereka pada kematian dan kerusakan di negara tersebut⁸.

Tetapi, laporan versi Israel membantah dugaan tersebut. Sebuah laporan mengatakan,

*"Israel's air strikes targeted known Hizbullah positions including the offices of its leadership, weapons storage sites, bunkers and rocket launch sites. Israel sought to disable infrastructure used by Hizbullah including Beirut's airport and certain roads and bridges through which Iran and Syria supplied weaponry to Hizbullah. Air strikes were supported by limited ground incursions to specific villages in southern Lebanon near Israel's border followed by a broader ground offensive with the goal of expelling as many Hizbullah terrorists as possible from southern Lebanon."*⁹

(Serangan udara Israel yang menargetkan posisi-posisi Hizbullah yang diketahuinya, termasuk kantor-kantor kepemimpinannya, tempat gudang persenjataan, tempat peluncuran bunker dan roket. Israel membuat infrastruktur tidak dapat digunakan oleh Hizbullah, termasuk bandara Beirut dan jalan serta jembatan tertentu, yang digunakan oleh Iran dan Suriah untuk menyuplai persenjataan kepada Hizbullah. Serangan udara dibantu dengan serangan darat yang terbatas kepada desa-desa tertentu di Lebanon wilayah tenggara, dekat perbatasan Israel yang diikuti oleh pertahanan darat yang luas dengan tujuan memaksa teroris Hizbullah sebanyak mungkin keluar dari Lebanon Tenggara).

Bahkan ketika akan menjatuhkan bom dari udara di daerah padat penduduk, Israel telah mengirimkan pesan kepada penduduk Lebanon untuk segera berpindah. Peringatan itu disampaikan dengan menjatuhkan jutaan pamflet dari udara. Tercatat lebih dari 17.000.000 lembar pamflet dijatuhkan dari udara oleh pasukan Israel¹⁰. Pamflet-pamflet ini pada umumnya berisi karikatur dan teks hinaan terhadap pemimpin Hizbullah, Nasrollah, dengan mengatakan bahwa dia

⁸ Lee, R. *The History Guy: The Israel-Hizbullah War 2006* (diakses pada 10 April 2010); diunduh dari http://www.historyguy.com/israel-lebanon_war_2006.html

⁹ *Glossary of Key Terms and Events in Israel's History* (diakses pada 9 April 2010); diunduh dari http://www.adl.org/Israel/advocacy/glossary/Lebanon_War_2006.asp

¹⁰ Herbert A. Friedman, *Psychological Operations during the Israel-Lebanon War 2006* (diakses pada 4 April 2010); diunduh dari <http://www.psvwar.org/israellebanon.php>

adalah teroris dan bertanggung jawab terhadap semua kerusakan yang disebabkan oleh perang Lebanon.

Berikut salah satu kutipan dari pamflet-pamflet yang disebar oleh Israel,

"People!

If you want to pursue your day to day life in peace you must cease providing assistance to those engaging in terrorist acts or those helping them, and you should take it upon yourself to insure that no terrorist activity takes place in your area.

Don't allow your homes to become terrorist dens against Israel or the price will be very costly for all of you both collectively and individually.

It is in your hands to stop the destruction and death.

There will be no excuse for those who have been forewarned."¹¹

(Wahai Masyarakat!

Jika kamu hendak mencari perdamaian dari hari-harimu, kamu harus berhenti memberikan bantuan kepada orang-orang yang terkait dengan tindakan-tindakan teroris atau yang membantu mereka, dan kamu harus memutuskannya sendiri untuk menjamin bahwa tidak ada tindakan-tindakan teroris yang berlokasi di wilayahmu.

Jangan biarkan tanah airmu menjadi tempatnya para teroris untuk menyerang Israel atau harganya akan sangat mahal untuk semua kehidupanmu, baik itu secara kolektif maupun individu.

Di tangan Andalah untuk menghentikan kehancuran dan kematian.

Tidak akan ada pengecualian bagi mereka yang sudah diperingatkan sebelumnya.)

Dalam perang Israel-Lebanon tersebut, Israel telah melakukan berbagai bentuk pembantaian serta pelanggaran perang terhadap penduduk sipil Lebanon. Di antaranya bisa dilihat selama perang 34 Hari pada Juli 2006 antara Israel versus Lebanon. Israel telah melakukan pelanggaran udara, hampir setiap hari sepanjang bulan dan tahun yakni dengan menggempur sasaran-sasaran sipil Lebanon dengan pesawat-pesawat pengebomnya. Belum lagi, pembunuhan massal di Qana yang dikenal sebagai "*Qana Massacre*" yang masih teringat dalam memori penduduk Lebanon dan sebagian masyarakat dunia. Inilah beberapa

catatan kejahatan perang Israel terhadap Lebanon yang menewaskan banyak penduduk sipil Lebanon.¹²

Perang Lebanon pada tahun 2006 telah menewaskan ribuan orang dan membuat ratusan ribu lainnya dipaksa mengungsi. Dari pihak Lebanon dan Hizbullah, perang ini telah menewaskan 1.130 penduduk sipil, 3.600 penduduk sipil cedera parah, 800.000 penduduk sipil mengungsi, 36 pasukan Lebanon tewas, 100 pasukan Lebanon terluka parah, 400 tentara Lebanon tertangkap, 65 pasukan Hizbullah tewas, dan 40 pasukan Hizbullah tertangkap. Sedangkan dari pihak Israel, 95 pasukan IDF tewas, 350 lainnya terluka parah, 2 pasukan IDF tertangkap dan kemudian kembali dalam keadaan tewas, 1 kapal perang tenggelam, 1 tank hancur, 41 penduduk sipil tewas, 1.293 penduduk sipil terluka parah, dan 300.000 penduduk sipil dipaksa mengungsi karena perang¹³.

Banyak pihak mengatakan bahwa Israel telah gagal dalam pertempuran selama tiga puluh empat hari ini. Kepentingan mereka dalam penyerangan terhadap Lebanon/Hizbullah tidak dapat tercapai. Kemampuan militer Hizbullah lumpuh secara temporal tetapi tidak dapat dikatakan hancur. Misi Israel untuk membuat popularitas Hizbullah di Lebanon dengan menghancurkan infrastruktur dan menyebarkan pamflet yang menyatakan bahwa Hizbullah adalah organisasi teroris juga gagal.

Popularitas Hizbullah di mata penduduk Lebanon justru meningkat, bahkan di mata penduduk beragama Kristen yang sebelumnya menentang aktivitas Hizbullah. Di sisi lain, Syria dan Iran terus menerus menyuplai senjata

¹² Mayor Ari Yulianto. 2010. *Lebanon Pra dan Pasca-Perang 34 Hari Israel VS Hizbullah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

¹³ *Lebanon after the War*. *Military Technology* 30:10-13 2006

kepada Hizbullah. Israel, dalam perang Lebanon tahun 2006, telah membunuh dan menghancurkan banyak hal, tetapi mereka tidak dapat mencapai tujuan yaitu, menghancurkan Hizbullah. Dengan kata lain, Israel telah gagal dalam perang di Lebanon¹⁴.

Kegagalan Israel dalam perang Lebanon tahun 2006 ini disimbolkan dengan jelas dengan penandatanganan perjanjian Israel pada Resolusi PBB 1071 (*UN's Resolution 1071*). Adapun isi dari resolusi PBB 1701 adalah :

1. Memonitor kesepakatan penghentian permusuhan di antara pihak-pihak yang bertikai.
2. Mendampingi dan membantu pemerintah Lebanon selama proses penggelaran pasukan Lebanon (LAF) di Lebanon Selatan. Hal itu dilaksanakan bersamaan dengan proses pengunduran pasukan Israel (IDF). Pemerintah Lebanon dan Israel akan mengordinasikan proses pengunduran pasukan di Lebanon Selatan.
3. Membantu pelaksanaan dan koordinasi dalam proses pengunduran pasukan IDF, baik dengan pemerintah Lebanon maupun Israel.
4. Memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sipil setempat serta membantu mengamankan proses kembalinya masyarakat, baik yang telah mengungsi maupun yang telah terpisah dari keluarganya selama berlangsungnya perang sepanjang bulan Juli sampai Agustus 2006.

¹⁴ Parton, Neville. *Israel's 2006 Campaign in the Lebanon: A Failure of Air Power or a Failure of Doctrine?* Royal Air Force Air Power Review 10:80-91 Summer 2007

5. Membantu pasukan LAF dalam proses mewujudkan zona wilayah yang bebas dari personel atau kelompok bersenjata beserta aset militer lainnya antara *blue line* dan Sungai Litani, kecuali aset militer dan senjata milik pemerintah Lebanon dan personel UNIFIL.
6. Meyakini bahwa wilayah tanggung jawab yang telah diberikan tidak digunakan untuk berbagai bentuk kegiatan yang dapat memicu terjadinya kembali konflik di antara pihak-pihak yang bertikai.
7. Membantu pemerintah Lebanon mengamankan garis batas antara Lebanon dan Israel serta sejumlah daerah yang dapat dijadikan titik-titik infiltrasi.

Salah satu tujuan Hizbullah dari resolusi ini adalah diadakannya pertukaran tawanan antara Israel dan Hizbullah. Di sini, Israel harus menyerahkan empat anggota Hizbullah yang ditawan sebelum perang Lebanon terjadi sedangkan Hizbullah harus melepaskan Ehud Goldwasser dan Eldad Regev yang ditangkap pada saat terjadi insiden Zar'it Shtula.

Ditandatanganinya resolusi yang mengharuskan adanya pertukaran tawanan ini tentu saja merupakan bentuk kemenangan tersendiri bagi Hizbullah, karena poin itulah yang menjadi tujuan awal penyerangan yang mereka lakukan di Zar'it. Sedangkan bagi Israel, hal ini tentu menjadi tamparan keras karena sejak awal, Perdana Menteri Ehud Olmert menyatakan bahwa Israel tidak akan bekerja sama dengan teroris.

Persetujuan Israel terhadap Resolusi 1071 PBB tersebut tentu saja merupakan langkah yang mengejutkan. setidaknya ketika dilihat dari paradigma

realis dalam memprediksikan perilaku negara. Paradigma ini menyatakan bahwa perilaku negara selalu terkait dengan kepentingan nasionalnya dan kekuasaan (*power*) yang dimilikinya. Tujuan utama dari segala tindakan negara, dalam paradigma realis, adalah mengakumulasi kekuasaan (*power*) demi tercapainya demi tercapainya kepentingan nasional. Oleh karena itu, unit eksplanasi yang paling memuaskan dalam studi hubungan internasional adalah kekuasaan dan kepentingan nasional. Tapi bagaimana menjelaskan persetujuan Israel terhadap Resolusi 1071 PBB dengan unit eksplanasi *power* dan kepentingan nasional?

Jelas bahwa kepentingan nasional Israel dalam perang Lebanon tahun 2006 adalah menghancurkan Hizbullah yang dianggap sebagai teroris. Sejak tahun 2000, Israel menuduh Hizbullah telah menyerang Israel sebanyak 20 kali dengan meluncurkan roket Kautilya di tempat-tempat padat penduduk di kota-kota di Israel. Ketegangan antara Hizbullah dan Israel mencapai puncaknya pada insiden Zar'it dan terjadilah perang Lebanon selama 34 hari.

Dari sisi kekuatan (*power*), juga sudah jelas bahwa Israel jauh lebih kuat dibanding Hizbullah. Israel mempunyai armada laut, udara dan darat yang dilengkapi dengan senjata-senjata yang sangat canggih. Kekuatan ini tentu saja tidak seimbang jika dihadapkan dengan kekuatan Hizbullah yang hanya mempunyai roket Kautilya sebagai senjata yang paling canggih. Ditambah lagi dengan fakta bahwa pemerintah Lebanon sama sekali tidak melakukan tindakan apa-pun ketika Israel menginvasi negaranya. Syria dan Iran yang selama ini dikenal sebagai pendukung dan sponsor Hizbullah juga tidak membantu Hizbullah

secara langsung. Praktis di sini, Hizbullah berdiri sendiri di hadapan Israel sehingga kekuatan mereka sangat tidak seimbang.

Seharusnya, dengan menggunakan unit eksplanasi *power* dan kepentingan nasional seperti yang disarankan oleh kaum realis, Israel akan terus menginvasi Lebanon dan menumpas Hizbullah sampai habis karena kekuatan yang dimiliki oleh Israel jauh lebih besar dibanding kekuatan yang dimiliki oleh Hizbullah. Tetapi pada kenyataannya, Israel bersedia menandatangani Resolusi 1071 PBB dan terpaksa menarik mundur pasukannya pada 14 Agustus 2006.

Bagaimana fenomena ini dapat dijelaskan? Unit eksplanasi apa yang paling tepat digunakan untuk menjelaskan perilaku janggal dari Israel ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat disingkat dalam satu rumusan masalah berikut.

B. Rumusan Masalah

Mengapa Israel mau menandatangani Resolusi 1701 PBB dalam perang Lebanon tahun 2006 dan faktor-faktor apa saja yang membuat Israel mau menandatangani resolusi tersebut sehingga memaksa mereka menghentikan peperangan dengan Hizbullah?

C. Landasan Teori

Penelitian ini akan menggunakan perspektif institusionalisme untuk menganalisis bagaimana Israel gagal dalam perang Lebanon pada tahun 2006.

Perspektif institusionalisme dalam hubungan internasional berbicara mengenai

bagaimana hubungan antara institusi dan negara, bagaimana negara mempengaruhi terbentuknya suatu institusi dan bagaimana sebuah institusi mempengaruhi perilaku negara. Institusi menurut Robert Keohane adalah “*a persistent and connected set of rules that prescribe behaviour, constrain activity, shape expectations*”¹⁵. (Seperangkat aturan yang bersambung dan tetap yang menentukan sikap, mendesak aktivitas, membangun harapan).

Menurut Keohane, ada setidaknya tiga bentuk institusi dalam politik internasional. Ketiga bentuk institusi tersebut adalah Organisasi, Rezim Internasional, dan Konvensi¹⁶. Namun, dalam penelitian ini, penulis hanya memfokuskan pada dua pendekatan yakni Organisasi dan Rezim Internasional dan ditambah dengan teori Intervensi sebagai bahan penguatan argumentasi dalam penulisan skripsi ini.

1. A. Organisasi

Bentuk pertama dari institusi adalah organisasi. Organisasi ini bisa dibentuk oleh aktor negara maupun non-negara. Institusi internasional yang berbentuk organisasi ini adalah institusi yang formal, bersifat birokratis, dengan aturan-aturan yang jelas dan tugas-tugas yang spesifik untuk mengatur individu dan kelompok. Organisasi ini dibentuk dengan sengaja agar dapat mengawasi dan bereaksi terhadap tindakan-tindakan dan tujuan yang telah disepakati oleh anggota organisasi tersebut.

¹⁵ Robert Keohane, “*Neoliberal Institutionalism: A Perspective on World Politics, in International Institution and State Power*”, Boulder: Westview Press, 1989, Chapter 1, hal 7-9.

¹⁶ Robert Keohane, “*Neoliberal Institutionalism: A Perspective on World Politics, in International Institution and State Power*”, Boulder: Westview Press, 1989, Chapter 1, hal 7-9.

B. Rezim internasional

Rezim adalah institusi dengan aturan-aturan yang jelas yang telah disepakati oleh pemerintah dalam pembentukannya yang berkaitan dengan suatu permasalahan tertentu dalam hubungan internasional. Dalam terminologi Orang Young, rezim merupakan suatu tatanan yang dinegosiasikan (*negotiated orders*). Contoh rezim yang ada adalah rezim moneter internasional yang dibentuk di Bretton Woods pada tahun 1944, Rezim hukum laut yang dibentuk oleh PBB, dan rezim pengawasan pembatasan senjata yang ada antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Krasner mendefinisikan rezim sebagai "*institutions possessing norms, decision rules, and procedures which facilitate a convergence of expectations.*" (Institusi-Institusi yang memiliki norma-norma, aturan-aturan yang diputuskan, dan prosedur yang memfasilitasi bertemunya harapan-harapan.).

Rejim dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan dan prosedur pembuatan keputusan yang implisit maupun eksplisit yang ada pada ekspektasi-ekspektasi aktor yang berkumpul dalam lingkup hubungan internasional. Menurut Keohane, terbentuknya institusi internasional terjadi karena adanya kerjasama yang berbeda dari harmoni ataupun perpecahan (*discord*). Dalam penjelasan Keohane,

"'Cooperation' is a contested term. As I use it, it is sharply distinguished from both harmony and discord. When harmony prevails, actors' policies automatically facilitate the attainment of others' goals. When there is discord, actors' policies hinder the realization of others' goals and are not adjusted to make them more compatible. In both harmony and discord, neither actor has an incentive to change his or her behavior. Cooperation, however 'requires that the actions of separate individuals or

*organizations'...be brought into conformity with one another through a process of policy coordination"*¹⁷

(Kerjasama merupakan istilah yang diperebutkan. Ketika saya menggunakannya, ia dibedakan dengan jelas dari baik itu keharmonisan maupun perselisihan. Ketika keharmonisan berlaku, kebijakan aktor (pelaku) secara otomatis memfasilitasi pencapaian tujuan pelaku lainnya. Ketika ada perselisihan, kebijakan aktor (pelaku) menghindari realisasi tujuan pelaku lainnya dan tidak diatur untuk membuatnya lebih kompetibel. Dalam keharmonisan dan perselisihan, baik itu pelaku tidak mempunyai insentif untuk merubah kelakuannya (sikap). Kerjasama, namun demikian, butuh bahwa tindakan individu atau organisasi yang terpisah dibawa ke dalam konformitas dengan satu sama lain melalui proses koordinasi kebijakan.)

Institusi terbentuk dari adanya kerjasama yang menuntut para aktor dalam hubungan internasional untuk berkompromi dengan kepentingan masing-masing yang berdeda bahkan bertabrakan satu sama lain. Dalam kerjasama (*cooperation*), para aktor saling menegosiasikan kepentingannya. Hal ini berbeda dengan harmoni di mana aktor-aktor dalam hubungan internasional saling membantu tercapainya kepentingan nasional masing-masing negara. Kerjasama juga berbeda dengan kondisi perpecahan di mana para aktor hubungan internasional saling memaksakan satu sama lain dan tidak mau bernegosiasi.

Robert Keohane mengklasifikasikan dua pendekatan dalam perspektif institusionalisme. Kedua pendekatan tersebut adalah pendekatan rasional (*rationalist approach*) dan pendekatan reflektivis (*reflectivist approach*)¹⁸.

Pendekatan rasionalis merupakan pendekatan yang diderivasikan dari paradigma realis yang melihat negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Negara dalam pendekatan ini dilihat sebagai aktor rasional yang

¹⁷ Keohane, Robert, *International Institutions: Two Approaches*, dalam *International Studies Quarterly*, Vol. 32, 1988, hal. 380

¹⁸ Weber Steven, *Institution and Change*, dalam Michael W. Doyle dan G. John Ikenberry (eds.), *New Thinking in International Relations Theory* Colorado: Westview Press 1997 hal 233-234.

selalu mengejar kepentingan nasionalnya dalam berhubungan dengan negara-negara lain di dalam suatu sistem internasional tertentu. Sebagai aktor rasional yang independen, negara menghitung atau mengkalkulasikan kepentingannya dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut.

Tetapi, sebagaimana dikatakan oleh Weber,

"States cannot get everything they want by themselves and because they live with other states in a world in which information is costly and imperfect, the problem becomes one of maximizing what comes out of an expected utility with many uncertain terms. In other words, states respond strategically to cues their external environment. Strategic actors constrained by these problems can take additional step. They will sometimes recognize that the outcomes of their actions are individually and collectively suboptimal, and they may find it in their instrumental interest to provide themselves with means to get around the constraints. Hence the value of institutions"¹⁹.

(Negara tidak mendapatkan segala yang mereka inginkan dengan cara bergerak sendirian dan karena mereka hidup dengan negara lainnya di dunia di mana informasi sangat berharga dan tidak sempurna. Masalahnya menjadi satu terhadap pemaksimalan apa yang keluar dari keperluan yang diharapkan dengan banyak istilah-istilah yang tidak jelas. Dengan kata lain, negara merespons secara strategis untuk memberi isyarat lingkungan luarnya. Pelaku-pelaku yang strategis dipaksa oleh masalah-masalah ini yang bisa mengambil langkah berikutnya. Mereka, kadang-kadang, akan mengakui bahwa hasil dari tindakannya suboptimal secara individu dan kolektif, dan mereka dapat menemukannya dalam kepentingan instrumentalnya untuk mempersiapkan dirinya dengan alat untuk sampai pada ketidakeleluasaannya. Oleh karena itu nilai-nilai institusi.

Di sini, negara bergabung atau membentuk institusi tertentu yang bekerja dengan cara yang bervariasi untuk mengurangi "*transaction costs*" dan membuat negara-negara lebih mudah untuk bekerja sama jika terdapat kepentingan yang sama.

Jadi, suatu penelitian yang menggunakan pendekatan rasionalis dalam perspektif institusionalisme harus mengidentifikasi siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam suatu fenomena tertentu, apa saja kepentingan aktor-aktor tersebut dalam fenomena tersebut, bagaimana konfigurasi kekuatan (*power*) dan alat-alat yang digunakan oleh aktor tersebut dalam mengejar kepentingannya, dan kemudian bagaimana pertukaran-pertukaran kepentingan terjadi dan bagaimana institusi yang mengatur pertukaran-pertukaran itu terbentuk.

Klasifikasi kedua dari Keohane adalah pendekatan reflektivis. Pendekatan ini mengambil asumsi yang berbeda dari pendekatan rasionalis tentang negara dan perilakunya. Jika dalam pendekatan rasionalis negara dipandang sebagai aktor yang otonom dan mampu mengidentifikasi kepentingannya secara independen. Negara dalam pendekatan reflektivis hanya eksis dalam konjungsinya dengan negara-negara lain dan lingkungan atau sistem internasionalnya. Dua aspek ini—negara dan lingkungannya—saling membentuk satu sama lain.

*"...what states do in defining themselves is to enter into lasting relationships with other states and to form institutions. Rather than seeking goals per se, states are "identity seeking" actors: they act so as to reinforce the special characteristics of identity that set them off from the environment."*²⁰

(Apa yang Negara lakukan dalam mendefinisikan dirinya adalah untuk memasuki hubungan yang sedang berlangsung dengan negara lain dan dalam rangka membentuk institusi. Lebih baik daripada mencari tujuan-tujuan perseorangan, negara adalah aktor-aktor 'yang mencari identitas': mereka bertindak untuk memperkuat karakter khusus dari identitas yang

Konsep negara sebagai pencari identitas (*identity seeking*) diambil dari psikologi humanistik yang memandang manusia tidak sekedar aktor rasional tetapi sebagai pencari identitas. Negara dalam hal ini tidak dipandang sebagai aktor yang selalu bertindak atas dasar kepentingan nasionalnya melainkan bertindak untuk mencari identitas. Sehingga, perilaku negara tidak harus konsisten ketika dihadapkan dalam konteks yang berbeda-beda karena identitas merupakan proses yang terus berjalan (*on going*) dan bukan sesuatu yang final seperti kepentingan nasional. Dalam formulasinya yang sederhana, pendekatan reflektivis dalam perpektif institusionalisme ini beranggapan bahwa institusi internasional berperan penting dalam menentukan perilaku negara dengan norma-norma dan aturan-aturan yang dimilikinya.

Dengan demikian, pendekatan reflektivis akan terfokus untuk mencari nilai atau norma-norma apa yang terdapat dalam suatu institusi, bagaimana struktur institusi tersebut dalam mendistribusikan nilai-nilai yang dimiliki, apa saja alat yang dimiliki oleh institusi tersebut yang bisa digunakan negara untuk mendapatkan identitas, dan bagaimana keseluruhan antara nilai-nilai, struktur dan alat tersebut mempengaruhi perilaku negara.

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang merupakan gabungan antara pendekatan rasionalis dan reflektivis. Pendekatan ini beranggapan bahwa institusi internasional bukan merupakan agregasi atau penjumlahan dari berbagai macam kepentingan dari anggota institusi. Institusi bagaimanapun juga merupakan entitas independen yang mempunyai norma dan nilai yang melampaui kepentingan negara dan dengan cara

tertentu, institusi mempunyai kekuatan imperatif yang dapat memaksakan perilaku negara. Tetapi di sisi lain, negara juga merupakan aktor rasional yang mampu merumuskan kepentingannya sendiri dan menyesuaikannya dengan kondisi lingkungan yang di bingkai oleh institusi. Negara dan insitusi dengan demikian berinteraksi secara dialektik.

Dalam kasus kegagalan Israel dalam perang Lebanon tahun 2006, institusi yang terlibat di dalam fenomena tersebut adalah PBB sebagai organisasi dan Resolusi 1701 PBB sebagai rezim. Dengan pendekatan institusionalis, harus dirumuskan siapa saja aktor yang terlibat dalam pembentukan ke-dua institusi tersebut. Apa kepentingan aktor-aktor tersebut dan sejauh mana konfigurasi kekuatan di antara aktor-aktor tersebut. Karena pendekatan yang digunakan adalah gabungan antara pendekatan reflektivis dan rasionalis maka, nilai-nilai yang di pakai sebagai dasar pembentukan institusi tersebut juga harus diidentifikasi.

Dengan menempatkan institusi sebagai unit yang menjelaskan kegagalan Israel dalam perang Lebanon tahun 2006 maka, peneliti telah meletakkan persoalan ini ke dalam konteks yang lebih luas. Aktor yang terlibat dalam “pemaksaan” terhadap Israel untuk menandatangani Resolusi 1701 PBB tidak hanya Hizbullah melainkan terdapat banyak aktor lain seperti media massa—sebagai pembentuk opini publik, negara-negara lain, PBB sendiri, dan aktivis perdamaian. Dengan demikian, Israel tidak ditempatkan dalam konfigurasi kekuatan sederhana antara Israel dan Hizbullah melainkan ditempatkan dalam konfigurasi kekuatan yang kompleks di antara banyak aktor.

2. Intervensi

The Penguin Dictionary of International Relation mendefinisikan intervensi sebagai “a portmanteau term which covers a wide variety of situations where one actor intervenes in the affair of another”²¹.

(Istilah Portmanteau yang meliputi keanekaragaman yang luas dari situasi di mana satu aktor mencampuri usaha yang lainnya)

Menurut Graham dan Newnham ada dua kondisi di mana proses intervensi bisa dilakukan. *Kondisi yang pertama* adalah munculnya negara-negara liberal di wilayah Eropa dan Amerika Utara telah menciptakan situasi politik yang lebih memungkinkan terjadinya intervensi. Munculnya negara-negara liberal ini telah memungkinkan suatu bentuk baru dalam politik internasional di mana negara-negara tersebut saling bergantung satu sama lain (*interdependence*)²². *Situasi yang kedua* adalah munculnya aktor-aktor baru dalam hubungan internasional. Pada awal abad ke-duapuluh, dunia menyaksikan pertumbuhan *intergovernmental organizations* (IGOs) di mana beberapa negara membentuk aliansi tertentu dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu pula. Bagi Graham dan Newnham, hal ini bermakna bahwa “these actors can adopt interventionist policies and attempt to implementation thereafter”²³. (Para Aktor ini mengadopsi kebijakan yang mengintervensi dan mencoba mengimplementasikannya kemudian). IGOs seperti

²¹ Evans, Graham and Newnham. *The Penguin Dictionary of International Relations*, London;

PBB misalnya telah mengirim pasukan perdamaian Bosnia dan mengadili seorang penjahat perang Serbia, Slobodan Milosevic.

Dalam studi Hubungan Internasional, negara kini bukan lagi satu-satunya aktor utama dalam hubungan internasional dan hal ini menyebabkan intervensi sudah menjadi kebiasaan atau norma umum. Bahkan PBB sendiri, telah memungkinkan adanya tindakan intervensi dalam Piagamnya (*threat to the peace*, Chapter VII). Bab tersebut membahas adanya kemungkinan bagi PBB untuk melakukan intervensi jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan PBB ini disebut sebagai *humanitarian intervention*. Prinsip *humanitarian intervention* ini sudah diterapkan PBB dalam kasus Iraq tahun 1991, Somalia, Haiti, Liberia, Rwanda dan Bosnia.

Dengan demikian, oleh organisasi-organisasi internasional, intervensi menjadi tindakan yang sah dilakukan ketika intervensi tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kebiasaan atau norma baru dalam pola Hubungan Internasional inilah, di mana intervensi menjadi sesuatu yang umum, yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini.

D. Hipotesa

Israel bersedia menandatangani Resolusi PBB 1701 karena adanya tekanan dari Organisasi Internasional seperti PBB, OKI dan Dunia Internasional untuk

E. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini akan dibatasi dalam jangka waktu antara tahun 2000-2006. Tahun 2000 dipilih sebagai awal penelitian karena pada tahun itulah konflik antara Hizbullah dan Israel di mulai. Sedangkan tahun 2006, digunakan sebagai batas akhir penelitian karena pada tahun itu Israel bersedia menandatangani Resolusi 1701 untuk menghentikan peperangan di Lebanon.

F. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui prosedur yang benar dalam penelitian
2. Mengetahui bagaimana menggunakan perspektif dan konsep tertentu dalam suatu penelitian yang melibatkan operasionalisasi konsep
3. Mendalami konflik antara dunia Arab dan Israel pada umumnya dan Hizbullah-Israel pada khususnya

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan di sini adalah metode penelitian pustaka yakni dengan cara pengumpulan data dari berbagai macam sumber yang ada untuk mendukung penelitian tersebut. Adapun yang penulis lakukan adalah sebagai berikut;

1. Mengumpulkan referensi-referensi yang terkait dengan penelitian penulis, baik itu dari perpustakaan, maupun Dosen dan teman sendiri.
2. Menoklining koran yang memuat perkembangan berita tentang Lebanon

3. Membuka website dan mencari data tambahan melalui internet.

Peneliti secara sistematis akan memetakan perang Arab-Israel Secara umum dan Israel-Lebanon secara khusus yang berujung pada keterlibatan institusi dalam memaksa Israel menurunkan kepentingan nasionalnya hingga ditandatanganinya Resolusi PBB 1701.

H. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, jangkauan penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II akan menerangkan bagaimana perang di Lebanon terjadi secara detail. Bagaimana konfigurasi kekuatan antara Hizbullah dan Israel dan bagaimana kronologi perang sampai penandatangan Resolusi PBB 1701.

Bab III akan menjelaskan siapa saja aktor yang terlibat dalam pembentukan rezim berupa Resolusi 1701 PBB, apa saja kepentingannya, dan seberapa besar kekuatannya. Juga nilai-nilai apa yang terdapat di PBB sehingga para aktor yang membentuk rezim Resolusi 1701 PBB tidak hanya terdorong oleh kepentingan tetapi juga nilai yang sudah disenakati bersama di PBB.

Bab IV akan menganalisis bagaimana institusi-institusi yang ada berhasil memaksa Israel untuk menandatangani Resolusi 1701 PBB

Bab V berisi tentang kesimpulan terhadap hasil penelitian tentang resolusi PBB 1071 sebagai kegagalan Israel dalam perang Lebanon tahun 2006